



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DI SDN  
BAGON 01 PUGER JEMBER**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**ELLA MUSTIKA SARI**

**NIM. 1310511016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**2017**

## **ABSTRAK**

Nama : Ella Mustika Sari  
Prodi : Ilmu Pemerintahan / Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Judul : Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01  
Puger Jember

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat untuk masa depan, Pada zaman sekarang pendidikan sangat penting untuk menunjang masa depan yang lebih baik, tapi pada kenyataannya masih banyak anak bangsa yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, banyak anak-anak yang sudah bekerja karna keterbatasan ekonomi, Seperti halnya dikota besar lainnya jember merupakan salah satu kabupaten di jawa timur dengan mayoritas penduduk terbesar ke 3 se- Jawa Timur. Mayoritas masyarakat kabupaten jember yang bisa di katakan menengah kebawah, masalah yang diulas dalam penelitian ini terjadi pada Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi Penelitian dalam Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah SDN Bagon 01 Kecamatan Puger Jember. Untuk penentuan informan peneliti menggunakan purposive sampling dan snowball sampling informan yang dipilih pada awal penelitian 5 orang.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan peran serta Pemerintah Kabupaten Jember (Dinas Pendidikan) yakni salah satunya melalui Program Kartu Indonesia Pintar, dengan disini peneliti akan meneliti secara mendalam terhadap Bagaimana implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember dan Permasalahan apa saja yang terjadi pada Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan Kartu Pintar

## **ABSTRACT**

Name : Ella Mustika Sari

Prodi : Ilmu Pemerintahan / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul : Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember

As we know that education is very important for society for the future, nowadays education is very important to support the better future, but in fact there are many children of nation that can not get proper education, many children who have been working because economic limitations, as in other large cities, Jember is one of the districts in eastern Java with the majority of the third largest population in eastern Java. The majority of Jember district people who can say middle to bottom, the issues reviewed in this study occurred in the implementation of smart card Indonesia policy at SDN Bagon 01 Puger Jember.

This type of research is qualitative research, qualitative research is research that produce descriptive data in the form of written or oral words of people and behavior that can be observed. Location of research in this research which become research location is SDN Bagon 01 subdistrict Puger Jember. For determination of informant of researcher using purposive sampling and snowball sampling of informant chosen at the beginning of research 5 person.

The results of this study have shown the role of Jember district government (education office) that one of them through smart card Indonesia program, with here researchers will examine in depth how the implementation of Indonesia smart card policy in SDN Bagon 01 Puger Jember and any problems that occur on implementation of smart card Indonesia policy at SDN Bagon 01 Puger Jember.

**Keywords** : Smart Card Indonesia Policy Implementation

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat untuk masa depan, Pada zaman sekarang pendidikan sangat penting untuk menunjang masa depan yang lebih baik, tapi pada kenyataannya masih banyak anak bangsa yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, banyak anak-anak yang sudah bekerja karna keterbatasan ekonomi, sementara kita ketahui anak-anak itu adalah yang akan melanjutkan bangsa ini pada kedepannya, dan apa yang akan terjadi pada bangsa kita jika generasi penerusnya tidak mendapat pendidikan yang semestinya. Pendidikan bukan hanya sebatas di sekolah (formal) tapi pendidikan di luar sekolah (informal) juga diperlukan, seperti kursus, bimbel dan lain sebagainya. Pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi agar semakin baik kedepannya, karna dengan pendidikan yang baik akan mampu mengubah negeri ini menjadi lebih baik pula, dalam kehidupan yang sebenarnya ada yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup tapi bisa sukses, akan tetapi alangkah baiknya jika kesuksesan itu di tunjang dengan pendidikan yang baik pula, agar dapat mengoptimalkan kesuksesan yang sudah di dapat.

KIP sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Program KIP sendiri akan ditujukan pada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia yang memiliki anak usia sekolah 7 hingga 18 tahun baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah. Dengan program KIP ini diharapkan angka putus sekolah bisa turun dengan drastis.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri memiliki beberapa manfaat yaitu pertama Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar

Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus, kedua Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juta anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH), ketiga KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah, keempat KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah, kelima KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Dengan adanya kartu indonesia pintar ( KIP ) masyarakat bisa menikmati kegunaannya, yang meringankan biaya sekolah agar anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman tidak ada beban dan agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Penelitian ini sangat penting dan menarik karena peneliti menganggap bahwa tidak semua masyarakat Puger kabupaten Jember mengerti atau memahami kegunaan dan fungsi kartu tersebut karena dilihat masih belum efektif dan efisien.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang menarik diteliti adalah :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember?
2. Permasalahan apa saja yang terjadi pada Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember.
2. Untuk mengetahui Permasalahan apa saja yang terjadi pada Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember.

### **Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan KIP di Kecamatan Puger merupakan kajian ilmiah dan diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya.

#### **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut keberlangsungan program KIP kedepannya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **Penentuan Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan daerah atau tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data-data yang nantinya diperlukan dalam penelitian. Lokasi Penelitian dalam Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah SDN Bagon 01 Kecamatan Puger Jember.

### **Sumber Data**

Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sebab, dengan data akan memperoleh untuk menganalisis suatu masalah. Pengumpulan

data dalam penelitian dilakukan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini juga membutuhkan suatu informasi atau data yang sebelumnya telah diambil dari beberapa informan yang dianggap telah memenuhi kriteria.

Dengan menggunakan “ *purposive sampling dan snowball sampling*” informan yang dipilih pada awal penelitian yaitu:

1. Kabid UPTD Kecamatan Puger
2. Kepala Sekolah SDN Bagon 01
3. Salah Satu Perangkat Desa Bagon
4. Masyarakat atau Wali murid Penerima KIP

### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Sumber pertama disini terdiri dari informan yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti (hasil dari wawancara,observasi dan narasumber ).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua, data yang sudah berupa gambaran atau dokumen yang sudah di himpun dan yang sudah diolah oleh kembali pihak lain.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Setelah semua data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian disajikan dan dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data atau informasi yang terkumpul dari para informan digambarkan

dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember**

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan maka sub sub ini akan disajikan hasil penelitian melalui observasi,wawancara dan dokumentasi langsung dengan informan yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian yang akan diuraikan berdasarkai teori dari Van Mater dan Varn Horn sebagai berikut :

#### **Standar dan sasaran kebijakan**

Standart dan sasaran kebijakan, setiap kebijakan publik harus mempunyai standart dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan,dalam standart dan sasaran kebijakan tidak jelas. Sehingga, tidak bisa terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahan pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan kartu indonesia pintar di SDN Bagon 01 diharapkan standart dan sasaran kebijakan tidak mengalami kesalahan atau salah sasaran.

#### **Sumber daya**

Sumber daya mempunyai beberapa Indikator yaitu:

##### **a. Dukungan Aparatur**

Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan.

##### **b. Dukungan Anggaran**

Untuk Sumberdaya Anggaran ini juga sangat penting dalam sebuah kebijakan. Tapi dari Informasi yang saya dapat dalam pelaksanaan kebijakan ini dianggap kurang.

#### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi , norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi



dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

Birokrasi merupakan suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

### **Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Indikatornya meliputi:

- a. Sosialisasi Tujuan Kebijakan
- b. Manfaat Kebijakan

Manfaat Kebijakan ini jika sesuai dengan aturan yang ada sebenarnya ditujukan bagi siswa yang kurang mampu untuk membantu meringankan biaya sekolah agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak seperti siswa lain yang mampu dalam perekonomiannya.

Namun, dikarenakan kurangnya Sumber Daya , Sosialisasi dan Komunikasi maka Manfaat Kebijakan ini tidak merata, tidak semua siswa yang kurang mampu mendapatkan kebijakan pemerintah ini, bisa dibilang kurang tepat sasaran.

Hal ini bisa dibuktikan dalam satu sekolah yang saya teliti disini terdapat ketidaksesuaian dengan aturan dari pusat. Misalnya: ada siswa dari keluarga mampu dari segi ekonomi mendapatkan KIP sedangkan siswa yang kurang mampu tidak mendapatkan KIP.

Dalam sebuah Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Desa Bagon setiap komunikasi diharapkan untuk tidak terjadi mis communication agar Kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai sasaran.

### **Disposisi atau sikap para pelaksana**

Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut sungguh-sungguh. ( Edward III dalam Widodo : 2010 )

Disposisi dalam penelitian ini sangat berpengaruh dan harus berjalan dengan baik antara para pelaku kebijakan dan pembuat kebijakan agar berjalan sesuai keinginan, Indikatornya meliputi :

- a. Disiplin Aparatur
- b. Kejujuran Aparatur

Disini kejujuran aparatur sangat berpengaruh dalam kebijakan ini agar tidak merugikan masyarakat yang mendapat KIP

### **Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Lingkungan sosial adalah interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya, atau lingkungan yang terdiri dari makhluk sosial yaitu manusia. Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk sebuah sistem pergaulan yang mempunyai peranan besar di dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang, dan kemudian terjadilah sebuah interaksi diantara orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya.

### **Permasalahan yang terjadi pada Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember**

Untuk permasalahan yang terjadi dalam sebuah Implementasi Kebijakan apabila dalam pengimplementasian KIP peran pelaksana tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu agar kebijakan bisa berjalan sesuai yang di harapkan maka dalam hal ini efektifitas peran pelaksana di lapangan bisa dilihat dari :

### **Proses Penyuluhan tidak sesuai dengan yang seharusnya**

Dalam hal ini untuk mewujudkan suatu implementasi dari sebuah Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dibutuhkan suatu proses. Salah satu proses tersebut yaitu proses penyuluhan, proses penyuluhan merupakan seseorang yang

memiliki peran, tugas dan profesi untuk menjalankan sebuah kebijakan yang dijalankan oleh implementor terhadap sasaran kebijakan.

Dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini proses penyuluhan harus benar-benar dilakukan implementor agar kebijakan bisa berjalan dengan baik, Seharusnya yang dilakukan oleh implementor yaitu mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung agar tidak terjadi salah sasaran seperti yang peneliti ketahui dilapangan, karena dilapangan masih banyak warga mampu yang mendapatkan sedangkan warga yang tidak mampu malah tidak mendapat, itu karena kurangnya proses penyuluhan yang mengakibatkan salah sasaran.

### **Proses Penentuan Siapa yang Menerima KIP**

Proses penentuan siapa yang menerima suatu kebijakan ini sebelumnya jelas sudah dipertimbangkan oleh Pemerintah tentang Program KIP dan kebijakan ini telah ditentukan dalam Permendikbud No.12 Tahun 2015 tentang Program Kartu Indonesia Pintar.

Untuk tahun 2016 KIP akan diberikan kepada 19,5 juta anak usia ( 6-21 tahun ) baik dari keluarga atau rumah tangga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. tetapi, disini peneliti melihat ada yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh implementor, karena dilapangan masih terdapat banyak penerima KIP yang salah sasaran, masih banyak orang yang mampu mendapat bantuan KIP tersebut.

### **Kurangnya Proses Pengawasan**

Proses pengawasan merupakan sebuah proses dimana implementor maupun pemerintah melakukan sebuah pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan. Dalam hal ini implementorlah yang harus bekerja extra guna tercapainya suatu tujuan kebijakan tersebut dibuat.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan implementor dapat menjadi faktor dan kendala dalam pengimplementasian kebijakan KIP

## **Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) merupakan penanda atau identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak sudah terdaftar dan mendaftar, pemberian bantuan tunai pendidikan

kepada seluruh anak usia sekolah ( 6-21 ) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan ( misalnya dari keluarga atau rumah tangga pemegang Kartu Keluarga KKS ) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian dari penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) sejak akhir 2014.

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Bagon 01 Puger Jember dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Untuk proses Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) dalam pengimplementasiannya Kebijakan ini memang masing belum sepenuhnya dijalankan oleh implementor atau pelaksana dilapangan. Sesuai dengan permasalahan yang ada mulai dari

1. Proses penyuluhan Kebijakan KIP kepada masyarakat atau siswa
2. Proses penentuan siapa yang menerima KIP
3. Proses pengawasan

Dari pengimplementasian diatas bisa kita lihat bahwa implementor atau para pelaksana belum sesuai dengan standart operasional atau SOP yang telah diberikan pemerintah, dengan demikian untuk tercapainya suatu tujuan masih ada kendala-kendala yang menghambat berjalannya kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan bisa berjalan apabila para implementor menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Dapat diketahui peran pelaksana dilapangan dalam pengimplementasiannya di SDN Bagon 01 sudah berjalan dengan baik, namun nyatanya dalam hal pengimplementasiannya masih kurang terbukti dengan adanya masyarakat yang belum mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan KIP tersebut dan tidak ada survei untuk para siswa penerima KIP. Hal ini tentunya menjadi koreksi tersendiri kepada implementor lembaga yang menjalankan sebuah kebijakan tersebut.

### **Saran**

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan proses sosialisasi pemerintah khususnya lembaga atau implementor dengan masyarakat dalam proses pengimplementasian Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
2. Perlu meningkatkan komunikasi dengan baik antara pemerintah terkait pembuat Kebijakan dengan implementor atau para pelaksana yang menjalankan kebijakan KIP.
3. Implementor perlu meningkatkan kinerja atau pelayanan sesuai dengan SOP yang telah diberikan oleh Pemerintah.
4. Pemerintah sebaiknya melihat apakah SOP yang telah dibuat dengan fakta dilapangan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada apa tidak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Imron. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Cleaves.(dalam Wahab 2008;187). *Definisi Implementasi*.  
[www.materibelajar.id](http://www.materibelajar.id)
- Dewantara Hajar Ki. *Pengertian Pendidikan*. <http://www.artikelsiana.com>
- Friedrich.(dalam Wahab 2008: 3). *Definisi Implementasi*.  
[www.materibelajar.id](http://www.materibelajar.id)
- Hadiatullah Rizky. 2016. *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*. Jember : Universitas Muhammadiyah Jember
- Harsono Hanifah (2002 : 67). *Implementasi Kebijakan dan Politik*.  
[www.dosenpendidikan.com](http://www.dosenpendidikan.com)
- Jones (1996:47) dalam pandangan Prof Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt.*Pengertian Kebijakan*. [www.edugovindonesia.com](http://www.edugovindonesia.com)

- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mazmanian A. Daniel dan Sabatier A. Paul (2005 : 65). *Pengertian Kebijakan Pelaksanaan*. [www.dosenpendidikan.com](http://www.dosenpendidikan.com)
- Meter Van dan Horn Van .(dalam Wahab, 2008: 65). *Definisi Implementasi*. [www.materibelajar.id](http://www.materibelajar.id)
- Mustopadidjaja. *Pengertian Kebijakan*. [www.pengertianahli.com](http://www.pengertianahli.com)
- Nakura Robert dan Smallwood Frank.(Tangkilisan, 2003:17). *Pengertian Implementasi*. [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com)
- Poerwadarminto.(1990: 327). *Pengertian Implementasi Kebijakan*. [www.Pembelajaran.pendidikan.blogspot.co.id](http://www.Pembelajaran.pendidikan.blogspot.co.id)
- Setiawan Guntur.(Setiawan, 2004 : 39).Implementasi Dalam Pembangunan. *Pengertian Implementasi*.[www.gurupendidikan.com](http://www.gurupendidikan.com)
- Sunggono Bambang.(1994 : 139). *Pengertian Implementasi Kebijakan*. [www.Pembelajaran.pendidikan.blogspot.co.id](http://www.Pembelajaran.pendidikan.blogspot.co.id)
- Surmayadi dalam Syukur (2005 : 79) . *Unsur Penting Dalam Proses Implementasi*. [www.dosenpendidikan.com](http://www.dosenpendidikan.com)
- Sawicki dan Patton (1993). *Pengertian Implementasi*. [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com)
- Syafiie.(2006:104). *Pengertian Kebijakan*. [www.edugovindonesia.com](http://www.edugovindonesia.com)
- Syaukani.(2004 : 295). *Pengertian Implementasi*. [www.dosenpendidikan.com](http://www.dosenpendidikan.com)
- Usman Nurdin. (Usman, 2002:70).Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. *Pengertian Implementasi*.[www.gurupendidikan.com](http://www.gurupendidikan.com)

Wahab Abdul.(1997:67). *Pengertian Implementasi Kebijakan*.  
[www.Pembelajaran.pendidikan.blogspot.co.id](http://www.Pembelajaran.pendidikan.blogspot.co.id)

Wastra Pranata. 1991. *Pengertian Implementasi*. [www.areabaca.com](http://www.areabaca.com)

Wildavsky dan Browne.(Usman, 2004: 7). *Definisi Implementasi*.  
[www.materibelajar.id](http://www.materibelajar.id)

Wildavsky dan Pressman (1984).(Tangkilisan, 2003:17). *Pengertian Implementasi*. [www.landasanteori.com](http://www.landasanteori.com)

Winarno Budi.2002.*Pengertiwan Implementasi*. [www.areabaca.com](http://www.areabaca.com)